

## FERRY FLIGHT PESAWAT CN235-220 MPA KE SENEGAL

Pesawat terbang CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) lepas landas menuju Dakar, Senegal sesuai prosesi Ferry Flight di Hanggar Fixed Wing PT DI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/3). PT Dirgantara Indonesia (DI) melakukan ekspor satu unit pesawat terbang CN235-220 (Maritime Patrol Aircraft) MPA ke Republik Senegal dan akan dioperasikan oleh Senegal Air Force.



## Penerimaan Negara dari BLU Melesat 139%

Hadiyanto mengatakan, kinerja pendapatan BLU yang masih terjaga dikarenakan upaya sinergitas BLU bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. "Melalui refocusing anggaran, transfer kas antar BLU serta simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan menjadi satu Peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan memudahkan pemahaman stakeholders," ujarnya.

**JAKARTA (IM)** - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat kinerja pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menembus target hingga 139% di tahun 2020. Angkanya mencapai Rp69,6 triliun dari target sekitar Rp50 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, kinerja BLU menjadi angin segar di tengah pandemi covid-19 dan penurunan ekonomi global. Adapun, jumlah BLU di Indonesia ada sebanyak 224.

"Di tengah tantangan pandemi dan penurunan ekonomi global, meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan sekitar 16%, namun pendapatan BLU mampu tumbuh positif sebesar Rp69,6 triliun dari target Rp50 triliun atau mencapai 139% dari target," kata Hadiyanto dalam acara Rakor BLU 2021 secara virtual, Jumat (19/3).

Ia menjelaskan, kinerja

pendapatan BLU yang mencapai Rp69,6 triliun di tahun 2020 pun meningkat 40,2% jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,8 triliun.

Hadiyanto menceritakan, kinerja pendapatan BLU yang masih terjaga dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah. "Melalui refocusing anggaran, transfer kas antar BLU serta simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan menjadi satu Peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan memudahkan pemahaman stakeholders," ujarnya.

Untuk tahun 2021, Hadiyanto mengatakan tantangan untuk mempertahankan kinerja BLU tetap ada, salah satunya karena masih adanya pandemic covid-19. Pemerintah menuntut BLU kerja keras di bidangnya masing-masing dalam meningkatkan kontribusi

businya untuk perekonomian nasional.

"Selama masa pandemi, BLU dituntut untuk mampu memberikan extra effort dan inovasi untuk penanganan pandemi covid-19, BLU juga didorong untuk mampu memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri

dan optimalisasi aset BLU," katanya.

Diungkapkan Hadiyanto, BLU juga dituntut untuk mewujudkan digitalisasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat atau sesuai apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai memprioritaskan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau untuk

masyarakat.

"Arahan bapak presiden tersebut dikuatkan kembali oleh Bu Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya waktu dan proses bisnis, meskipun tidak mengutamakan profit," tandasnya. • **hen**

## Erick Thohir: Produk Inka Diakui Dunia

**JAKARTA (IM)** - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong agar perseroan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Hal itu tak hanya memperkuat komitmen dan tujuan BUMN Go Global, namun juga menangkap peluang yang lebih besar atas jasa dan produk BUMN di pasar dunia.

Dalam kunjungan perdana ke perusahaan manufaktur kereta api dan transportasi terpadu pertama di Asia Tenggara tersebut, Erick berharap INKA dapat menjadi lokomotif dalam memperkuat tujuan BUMN Go Global.

"Saya bangga dengan PT INKA. Dengan produk yang sudah digunakan di Asia, Afrika, dan Australia, menandakan produk nasional kita diakui dan mampu bersaing pasar global. Apalagi jika PT INKA bisa

bekerja sama dengan BUMN di pasar global. Hal itu akan menyatukan kekuatan BUMN di luar negeri, sekaligus menciptakan efisiensi operasional," ujar Erick dalam keterangan pers, Jumat (19/3).

Dalam dua tahun terakhir, INKA telah mampu mengeksport beragam jenis produk, seperti lokomotif, kereta penumpang, kereta rel listrik, kereta penggerak, gerbong barang, light rail transit, hingga trem bertenaga baterai yang sudah diuji coba sebagai moda alternatif mengatasi kemacetan di perkotaan transportasi perkotaan.

Dalam kunjungan selama dua jam, Erick menyempatkan diri meninjau pabrik sekaligus kantor pusat INKA. Di lokasi yang berjarak 10 km dari pintu keluar tol Madiun tersebut, dia mendapat penjelasan mengenai

sistem transportasi terpadu berbasis kereta api yang kini menjadi salah satu industri strategis kebanggaan Indonesia. "PT INKA diharapkan terus melakukan inovasi. Tak hanya inovasi produk, tapi juga inovasi bisnis dengan melakukan investasi atau akuisisi di luar negeri. Industri transportasi merupakan industri strategis jadi pasar dan peluang bisnisnya sangat besar," kata Erick.

Saat ini INKA bersama PT LEN Industri (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah membangun Indonesia Railway Development Incorporated for Afrika di Kinshaha, Kongo dan Indonesia Railway Development Consortium bersama KAI (Persero), LEN, dan Waskita Karya (Persero). • **dro**

## Menteri Ekonomi Jepang Apresiasi UU Cipta Kerja & Relaksasi PPnBM RI

**JAKARTA (IM)** - Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiya Hiroshi mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Jepang menaruh harapan dengan UU ini, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik pada masa mendatang.

Hiroshi menyebut Pemerintah Jepang berharap UU Cipta Kerja mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi. Hal-hal itulah yang selama ini diharapkan oleh pelaku usaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hiroshi saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pertemuan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin mempererat kerja sama industri dengan Jepang.

Agus berharap kunjungan ini dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Negeri Sakura tersebut. Dalam kunjungan kerja ke Jepang

beberapa waktu lalu, Agus juga membicarakan hal-hal strategis terkait hubungan kedua negara.

"Dengan Menteri Kajiya Hiroshi, kami membahas pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Menteri Kajiya juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang akan masuk ke Indonesia," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3).

Produk otomotif Jepang yang selama ini mendominasi pasar Indonesia termasuk pihak yang diuntungkan. Agus pun berharap agar Pemerintah Jepang mendorong perusahaan Jepang untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Kedua menteri juga membahas tentang emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia perlu

menyusun roadmap untuk tujuan yang sama.

"Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendah-rendahnya, termasuk lewat program LCGC (low-cost green car) dan mengarah ke EV (electric vehicle), kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan di Indonesia," kata Agus.

Disebutkan Agus, dalam mengembangkan rencana itu maka diperlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif. Kebijakan pemerintah Indonesia sudah berjalan, seperti penerapan mandatory biodiesel (B30) yang juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan sumber energi terbaru dan terbarukan. "Kemenperin mendorong pengelolaan industri otomotif secara bijak, namun kami sepatutnya dengan upaya pencapaian target carbon neutral," ucap Agus. • **dot**

## Kemenperin Dukung Target Penyerapan Garam Lokal Hingga 1,5 Juta Ton

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penambahan serapan garam rakyat oleh sektor industri. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani garam, sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku garam bagi sektor industri.

"Kebutuhan garam bagi sektor industri saat ini terus meningkat dengan produktivitasnya yang tinggi. Kami berharap, penyerapan garam berkualitas dari para petani garam dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (19/3).

Dengan fasilitasi Kemenperin, dalam dua tahun terakhir pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara kelompok petani garam dengan pelaku industri, garam yang terserap mencapai lebih dari 2 juta ton. Kemenperin menargetkan, penyerapan garam dari petani oleh sektor industri pada tahun 2021 dapat naik hingga mencapai 1,5 juta ton.

"Ini merupakan penugasan dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Kami juga mendorong penyerapan untuk garam dengan kualitas mulai K2, K1, hingga premium," ujar Agus.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mengupayakan penyerapan hingga 1,5 ton pada tahun 2021 untuk garam lokal dengan kadar NaCl minimal 90%, atau naik 13,8% dari tahun sebelumnya.

Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin untuk mendata penyerapan garam oleh pelaku IKM.

"Kami juga mulai berkoordinasi langsung dengan koperasi binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujar Ketua Umum AIPGI, Tony Tanduk.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan garam rakyat, di samping tetap menggunakan garam impor.

Kebutuhan bahan baku garam pada industri makanan dan minuman tersebut untuk tahun ini akan berkisar 743.000 ton. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 530.000 ton.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan untuk kebutuhan tahun ini, industri tidak akan sepenuhnya mengandalkan garam impor. Dia menyatakan telah ada komitmen penyerapan garam rakyat sebanyak 131.000 ton. "Tentunya kalau PT Garam bisa menambah produksi garam industri, kami akan lebih besar penyerapannya," tuturnya.

Adhi menyebut industri makanan dan minuman dituntut membuat produk yang baik dengan masa simpan yang panjang. Alhasil, jika banyak ditemukan kontaminan, maka kualitas produk akan sulit terjaga. "Petani kalau bisa bikin garam bagus dan harga bisa diatur supaya lebih untung tetapi dengan kualitas tinggi tentu akan diserap industri," lanjutnya. • **dro**



## PROGRES PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU

Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawatu (Cisumdawu) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (19/3). Proyek Jalan Tol Cisumdawu yang telah mencapai 84,38 persen tersebut rencananya akan menjadi jalur alternatif pada arus mudik lebaran 2021 bagi pemudik yang akan menuju Kabupaten Sumedang.



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

**SU 01019**  
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

**Telepon Hemat Ke Luar Negeri**  
Suara Jernih ngobrol pun nyaman

**Cuma Rp 6 an./detik\***

**Tekan Kode Akses 01019**  
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxxx

\* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6 an./detik dengan menggunakan GSM Telkomsel  
\* Tarif belum termasuk PPN & pembatasan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNG  
Customer Service : 021-634 5009  
Mobile : 0811 17 50 291-95  
SMS : 0811 17 50 369  
E-mail : support@gaharu.co.id

**GAHARU**  
www.gaharu.co.id



**TARGET PRODUKSI BAWANG MERAH 2021**  
Petani memanen tanaman bawang merah di Desa Polagan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (19/3). Kementerian Pertanian mematok produksi bawang merah sebanyak 1,74 juta ton guna mendukung target produksi strategis tahun 2021.

## BNI Siapkan Program Khusus Pembiayaan Pertashop

**JAKARTA (IM)** - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersinergi dengan PT Pertamina (Persero), mendukung pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ingin memiliki usaha di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Mitra Pertashop.

BNI bakal menyiapkan Program Khusus Pembiayaan Pertashop yang diharapkan akan mempercepat terwujudnya 70.000 desa dengan SPBU Mini Pertamina.

Peresmian Pertashop dan penyerahan secara simbolis fasilitas pembiayaan kredit antara BNI, Pertamina dan Mitra Pertashop dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal dan Direktur Keuangan Subholding Commercial & Trading Pertamina Arya Supriyadi.

Pertashop atau Pertamina Shop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG Non Subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi di pedesaan atau kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina. Pertamina menawarkan 3 jenis Investasi Pertashop, yaitu Gold (untuk investasi senilai Rp250 juta), Platinum (investasi Rp400 juta) dan Diamond (investasi Rp500 juta).

Calon mitra diberikan pilihan dua skema investasi yang ditawarkan. Pertama, skema

Investasi Company Owner Dealer Operation (CODO), dalam skema ini Pertamina sebagai investor dan mitra sebagai pengelola Pertashop. Kedua, skema Dealer Owner Dealer Operation (DODO), yaitu mitra sebagai investor sekaligus pengelola Pertashop.

Ada beberapa persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi mitra Pertashop. Pertama, memiliki legalitas usaha berbentuk badan Usaha dan atau badan hukum (CV, Koperasi, PT). Kedua, memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, akta perusahaan. Ketiga, memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop. Keempat, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa.

Adapun pendaftaran mitra dapat dilakukan dengan mengajukan diri dengan menginput data di web www.kemitraan.pertamina.com serta menyiapkan detail lokasi, legalitas badan usaha, dan melampirkan surat rekomendasi desa. Proses berikutnya, pihak Pertamina melakukan verifikasi lapangan, dalam proses ini dilakukan pengecekan izin bangun dengan design yang disetujui Pertamina.

Calon mitra diberikan pilihan dua skema investasi yang ditawarkan. Pertama, skema